



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah. Secara khusus Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan.

Tidak lupa, ucapan terima kasih kepada Personil Pilihan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (*Teamwork*) yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya secara maksimal.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Tujuan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan dengan penanganan yang baik (*good governance/yang amanah*). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dan perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan Kinerja ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Demikian disampaikan, semoga Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP melalui pembangunan partisipatif yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, demokratis yang dalam pengambilan keputusan berdasarkan pada hukum dan keadilan, mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan mandiri serta berdaya saing tinggi dengan semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintah dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas. Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, atas koreksi dan saran perbaikan Laporan Kinerja ini dimasa mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Sekian dan terima kasih.

Malang, Februari 2021

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Drs. BAMBANG ISTIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198602 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Disamping itu, Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 ini merupakan realisasi dan capaian kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, akan dikemukakan secara singkat tentang hasil pengukuran terhadap Sasaran-Sasaran yang telah ditetapkan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap pencapaian Tujuan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya, demikian pula langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendala yang kemungkinan akan terjadi pada tahun mendatang, lewat ringkasan sebagai berikut :

- A. Sasaran Pertama : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal;.
- B. Sasaran Kedua : Penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik
- C. Sasaran Ketiga : Pemulihan Masyarakat dan sarana dan prasarana yang lebih baik
- D. Sasaran Keempat : Tata kelola administrasi kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Secara keseluruhan alokasi anggaran yang ada untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sesudah Perubahan Anggaran sebesar Rp. 6.057.108.281,81 (enam miliar lima puluh tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh satu sen) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun 2020.

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.175.571.994,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.899.132.062,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu enam puluh dua rupiah) atau 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen), Belanja Langsung sebesar Rp. 3.881.536.287,81 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen) terealisasi sebesar Rp. 3.396.533.117,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah) atau 87,50% (tujuh puluh sembilan

koma dua puluh tujuh persen) dan sisa dana sebesar Rp. 485.003.170,81 (empat ratus delapan puluh lima juta tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah delapan puluh satu sen).

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya peralatan penanggulangan bencana;
2. Masih kurang paham lintas sektoral, OPD dan organisasi kemanusiaan dalam penanggulangan bencana;
3. Rekap data hanya sebatas kejadian bencana dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum ada MOU dengan lintas sektoral, OPD terkait dan organisasi kemanusiaan; dan
4. Belum terlatihnya/peningkatan kapasitas tim Pusat Kendali Operasional dan Tim Reaksi Cepat dalam percepatan pemberian informasi dan penanggulangan bencana.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan peralatan penanggulangan bencana yang memadai dalam penanganan kejadian bencana;
2. Peningkatan koordinasi dengan pelatihan bersama sistem komando, kebutuhan dasar logistik kejadian bencana, workshop, gladi lapang dan semacamnya;
3. Tersedianya sarana prasarana dalam penyelenggaraan pusat data kendali operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana berupa aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan Terpadu; dan
4. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Tim Pusdalops dan Tim Reaksi Cepat dalam dalam rangka percepatan pemberian informasi dan nanganan bencana.

Antisipasi ke depan yang akan terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan kepada keseluruhan manajemen resiko bencana.

Semoga pencapaian Sasaran di tahun mendatang akan lebih mengarah pada suatu kondisi yang lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Malang, Februari 2021

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Drs. BAMBANG ISTIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198602 1 003

D A F T A R I S I

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	3
1. Organisasi Perangkat Daerah	3
2. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2019	12
D. Sistematika	25
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	27
A. Perencanaan Strategis	27
1. Tujuan dan Sasaran	27
2. Kebijakan dan Program	29
B. Perjanjian Kinerja	32
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
1. Capaian Kinerja	34
1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2019	34
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019	34
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	35
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	35
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran	46
3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	47
3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran	48
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
B. Realisasi Anggaran	50
C. Prestasi Tahun 2020	52
BAB IV : PENUTUP	53

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- Rencana Kinerja Tahun 2020
- Pengukuran Kinerja Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrogis dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Malang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik disebabkan faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Kabupaten Malang yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan **penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.**

Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan 2 (dua) buah peraturan daerah sebagai amanat dari Undang-undang nomor 24 tahun 2007, yaitu : (1) Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Komitmen dan kewajiban formal sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengharuskan bahwa, setiap realisasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan wajib dilakukan dengan menerapkan mekanisme pertanggungjawaban publik yang valid, terukur, dan sah lewat penyusunan Laporan Kinerja di setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKj juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat.

Berangkat dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 serta Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Malang tahun 2020 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2020.

Penyusunan LKJ berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 selain memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang kepada Bupati Malang ini telah disusun sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKj ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2020.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yakni berupa tindakan kebencanaan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca bencana terjadi.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai penjabaran dari sasaran dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

C. GAMBARAN UMUM

1. Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- A. Kepala Badan;
- B. Unsur Pengarah; dan
- C. Unsur Pelaksana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
3. Pelaksanaa n penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menurut Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2011 komposisinya sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretaris pelaksana, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas :
 1. Memimpin, mengawasi, membina, mengendalikan dan

melaksanakan kerja sama serta koordinasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Pelaksana BPBD;
2. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan BPBD;
3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Pelaksana BPBD;
4. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Pelaksana BPBD;
5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah BPBD; dan
6. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan BPBD.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikannya;
 - d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
 - f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
 - g. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran BPBD;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis BPBD;
 - e. Melaksanakan pengurusan pembayaran hak-hak keuangan;
 - f. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis BPBD;
 - g. Mengkompilasikan dan menyusun hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas BPBD; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis BPBD;
 - c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan BPBD;
 - d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 - e. Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan BPBD;
 - f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan BPBD;
 - g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan BPBD;
 - h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang penanggulangan bencana;

- i. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang penanggulangan bencana;
 - j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
- 1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - 4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :

- 1. Seksi Pencegahan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya;
 - b. Melaksanakan pemantauan terhadap :
 - Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 - Penggunaan teknologi tinggi.
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyusunan uji coba rencana penanggulangan

- ke daruratan bencana;
- b. Melakukan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistim peringatan dini;
 - c. Menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Melakukan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. Menyiapkan lokasi evakuasi;
 - f. Menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap darurat bencana;
 - g. Menyediakan dan menyiapkan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana;
 2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 4. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 5. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; dan
 6. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :

1. Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
- b. Menentukan status keadaan darurat bencana;
- c. Menyelamatkan dan mengevaluasi masyarakat terkena bencana;
- d. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. Melaksanakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Melaksanakan pendistribusian logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

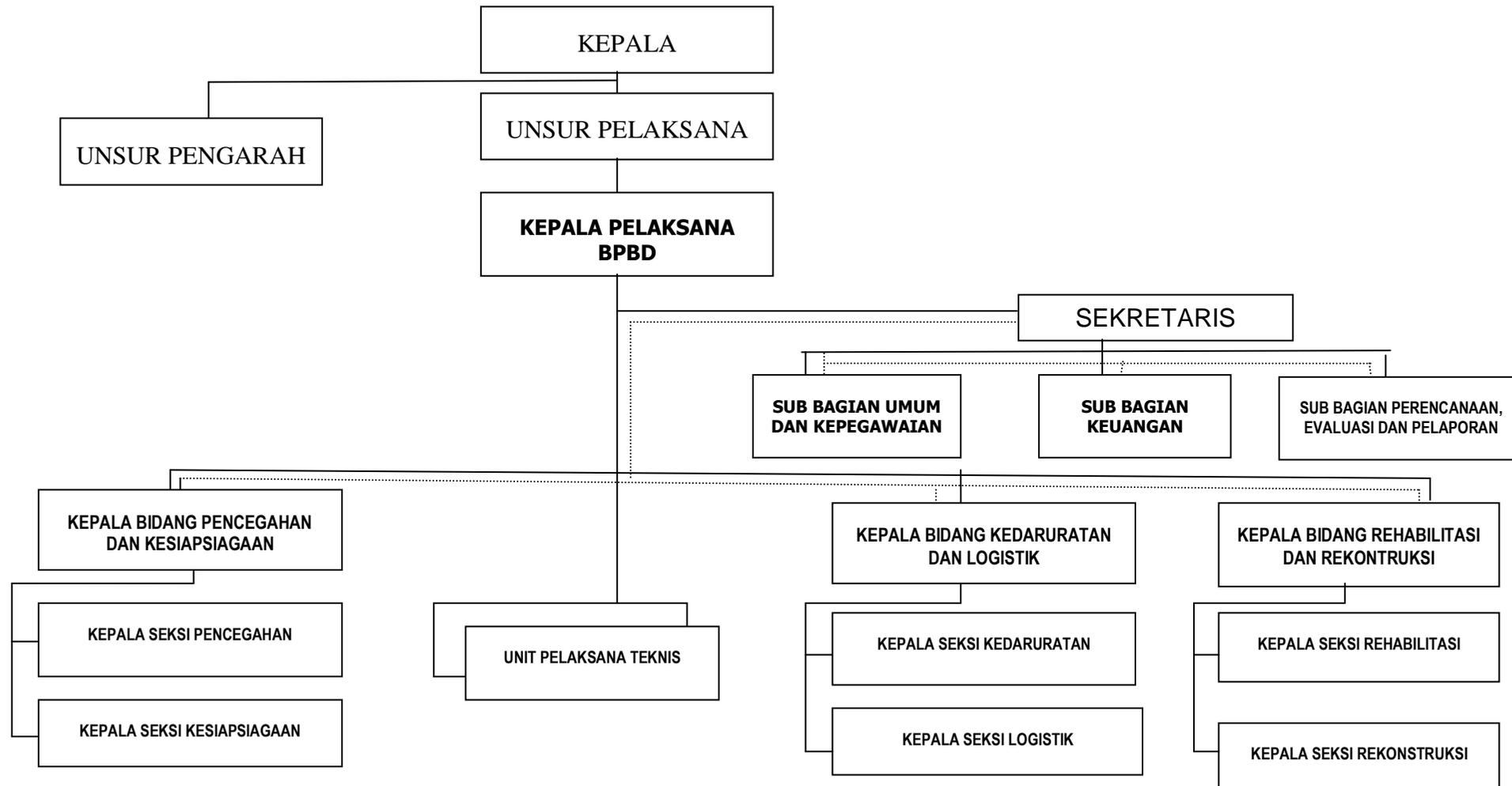
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :

1. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. Memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - e. Melaksanakan rekonstruksi dan resolusi konflik;
 - f. Melaksanakan pemulihan psikologis, sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan serta pelayanan publik; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. Melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. Melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. Mendorong partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. Meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. Meningkatkan fungsi pelayanan publik;
 - h. Meningkatkan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAGAN STRUKTUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



Keterangan :

_____ = Garis Komando

2. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2019

Capaian Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2019 di uraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal	Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	77%	77%
2	Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik	Persentase Penanganan bencana	100%	100%
3	Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	81%	81%

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut, diketahui bahwa capaian semua indikator dapat dikatakan mengalami keberhasilan antara lain :

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut, diketahui bahwa capaian semua indikator dapat dikatakan mengalami keberhasilan antara lain :

A. Pada Indikator Persentase Desa Tangguh Bencana dengan target 81,3%, tercapai 81,3% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana (33 komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen) capaian sebesar 100% dapat dikatakan **berhasil**, indikator ini didukung oleh Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, dengan kegiatan :

1. Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana dengan indikator :

1.1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi kebencanaan dilaksanakan di 11 wilayah sebagai berikut :

- a. Bulan Januari : 1 wilayah di Kecamatan Ngantang;
- b. Bulan Februari : 2 wilayah di Kecamatan Wagir dan Kecamatan Pujon;
- c. Bulan April : 5 wilayah di Kecamatan Singosari, Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Dau, dan Kecamatan Jabung; dan
- d. Bulan Agustus : 3 wilayah di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, dan Kecamatan Gedangan.

1.2 Pengurangan Resiko Bencana.

Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana melalui Pendampingan Pembentukan Forum PRB di Tingkat Desa yang dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 6 Juli 2019 bertempat di Hotel Syariah Radho Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang dihadiri oleh 40 orang peserta yang terdiri Kepala Desa dan BPD Desa di daerah rawan bencana di Kabupaten Malang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi Kepala Desa dan BPD desa tentang bagaimana melakukan Penyusunan dan atau Penggunaan Dana Anggaran yang ada di desa untuk kegiatan Kebencanaan sesuai dengan aturan yang ada serta untuk memotivasi desa untuk membentuk Forum PRB di tingkat desa.

1.3 Mitigasi Non struktural

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan SOP Penanganan Bencana pada tanggal 1 s/d 3 Juli 2019 yang bertempat di Hotel Mirabel Kecamatan Kepanjen dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Kodim, Polres, dan RAPI. Selain itu juga dihadiri fasilitator dari PT. Mahoni Cakra Saujana Yogyakarta dan Tim Penyusun Dokumen dari CV. Irama Tembang Elok. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman di tingkat OPD tentang SOP Penanganan Bencana dengan adanya acuan baku yang disepakati oleh pemangku kebijakan/OPD dalam penanganan bencana di Kabupaten Malang.

1.4 Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH) yang dilaksanakan di 25 Sekolah sebagai berikut :

- a. Bulan Februari : 5 Sekolah yaitu SDN II Ngroto Kecamatan Pujon, SDN II Kalisongo Kecamatan Dau, SDN III Gondowangi Kecamatan Wagir, SDN IV Pondok Agung Kecamatan Kasembon, dan SDN II Ampeldento Kecamatan Karangploso;
- b. Bulan Maret : 1 Sekolah yaitu SDN III Kedungsalam Kecamatan Donomulyo;
- c. Bulan April : 3 Sekolah yaitu SDN III Ngroto Kecamatan Pujon, SDN II Pondok Agung Kecamatan Kasembon, dan SDN II Talangsuko Kecamatan Turen;
- d. Bulan Mei : 1 Sekolah yaitu SDN III Kidangbang Kecamatan Wajak;
- e. Bulan Agustus : 5 Sekolah yaitu SDN I Kedungrejo Kecamatan Pakis, SDN II Pajaran Kecamatan Poncokusumo, MI Romli Afifah Tambak Asri Kecamatan Tajinan, MI Sunan Giri Wonokerso Kecamatan Pakisaji, dan SDN 3 Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung;
- f. Bulan September : 4 Sekolah yaitu SDN 1 Gampingan Kecamatan Pagak, SMPN 2 Lawang Kecamatan Lawang, SMPN 2 Kalipare Kecamatan Kalipare, dan SMAN Sumbermanjing Wetan Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- g. Bulan Oktober : 2 Sekolah yaitu MI Al Fatah Jatisari Kecamatan Tajinan dan SDN 3 Turen Kecamatan Turen; dan
- h. Bulan Desember : SDN 3 Sidodadi Kecamatan Gedangan, MI Ta'allamul Huda Sumberejo Kecamatan Poncokusumo, SDN 1 Sidodadi Kecamatan Gedangan, dan MTs Ta'allamul Huda Sumberejo Kecamatan Poncokusumo.

1.5 Sekolah/Madrasah Aman Bencana

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi SMAB (Sekolah/Madrasah Aman Bencana) berbasis Teknologi Informasi Android melalui Program SPAB (Satuan Pendidik Aman Bencana) dan Pengenalan Aplikasi SANTANA (Sekolah Tangguh Aman Bencana). Hal yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah adanya basis data yang dapat disampaikan oleh sekolah melalui aplikasi SANTANA yang

disusun oleh BPBD Kabupaten Malang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2019 di Hotel Radho Syariah di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang diikuti oleh 40 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Guru di daerah rawan bencana.

2. Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana dengan indikator :

2.1 Desa Tangguh Bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana yaitu Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo pada 12 s/d 14 Maret 2019; Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan pada 27 s/d 29 November 2019 dan Desa Sumberejo Kecamatan Poncokusumo pada 11 s/d 13 Desember 2019. Dalam setiap kegiatan pelatihan dihadiri tim pokja destana sebanyak 30 orang dan peserta gladi lapang sebanyak 100 orang. Dan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana secara mandiri yaitu Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen pada tanggal 12 s/d 14 November 2019. Selain itu juga ada desa tangguh bencana mandiri yaitu Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 2019 yaitu pembentukan satuan tugas penanggulangan bencana (Desa Tangguh Bencana). Desa Tangguh Bencana yang terbentuk diharapkan masyarakat mampu menghindari dan menyelamatkan diri dari resiko bencana. Bahkan ke depan mereka juga mampu mencegah kemungkinan terjadinya bencana melalui kegiatan pengurangan resiko bencana.

2.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pengadaan dan pembelian:

- a. Rambu-rambu jalur evakuasi sebanyak 41 unit;
- b. Container plastic sebanyak 5 set;
- c. Papan Tulis sebanyak 2 buah;
- d. Laser Pointer sebanyak 2 buah;
- e. Lemari Arsip 2 rak sebanyak 2 unit;
- f. GPS sebanyak 2 unit; dan
- g. Handy Talkie sebanyak 4 Unit.

2.3 Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Piket Kesiapsiagaan Bencana.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019 di Halaman Pendopo Kabupaten Malang di Kepanjen, Jl. Panji Nomor 159 Kepanjen berupa Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang bersamaan dengan Hari Otonomi Daerah yang dihadiri oleh 325 orang peserta yang terdiri dari BPBD, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPKPCK, DPU Binamarga, DPU SDA, Dinas Pendidikan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, RSUD Kanjuruhan, Satpol PP, Tagana, PMI dan relawan bencana. Selain itu juga dilaksanakan piket kesiapsiagaan bencana yang terdiri dari 8 orang tiap harinya yaitu 2 orang anggota Pusdalops BPBD selama 365 hari dimulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2019 di kantor BPBD Kabupaten Malang.

2.4 Mitigasi Struktural

Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus s/d 5 September 2019 di Pantai Tamban Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan dengan pasangan batu dengan mortar (1pc:4pp) membangun tembok penahan gelombang air laut sepanjang 50 meter.

2.5 Pembentukan Pusat Pengendalian dan Operasi (PUSDALOPS)

Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan merekrut anggota Pusdalops sebanyak 8 orang yang dimulai pada bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019. Pada bulan April 2019 telah ada sebanyak 8 anggota Pusdalops yang siap untuk dididik dan dilatih untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai operator Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops). Pelatihan tersebut dilaksanakan berupa pelatihan Keselamatan, Kesehatan, dan Kerja (K3) Dasar pada tanggal 28 s/d 29 September 2019 di Pusdiklat PB Kota Batu. Harapan dari kegiatan ini adalah untuk peningkatan kapasitas anggota Pusdalops.

- Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
 - a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi tentang kebencanaan terhadap semua lapisan masyarakat, lintas lembaga dan organisasi;
 - b. Sinergitas antara masyarakat, lintas lembaga, lintas organisasi dan lintas OPD dalam pengelolaan Penanggulangan Bencana;

- c. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam rangka perencanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja Indikator Persentase Desa Tangguh Bencana pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan informasi kebencanaan terhadap akademisi dan dunia usaha;
 - b. Melakukan pendampingan kepada desa-desa dalam rangka pembentukan desa tangguh bencana (Destana) secara mandiri;
 - c. Penambahan sarana prasarana dan rambu-rambu informasi Penanggulangan Bencana;
 - d. Adanya Tim PUSDALOPS (Pusat Pengendalian dan Operasi) dalam pengelolaan data, penerimaan informasi dan penyebarluasan informasi penanggulangan bencana; dan
 - e. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana.
- B. Pada Indikator Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Diselamatkan dengan target 85%, tercapai 85% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 119 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 119 kejadian) Capaian 100% dapat dikatakan **sangat berhasil**, indikator ini didukung oleh Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan kegiatan :
1. Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana, dengan indikator:
 - 1.1 Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Sistem Penanganan Darurat Bencana yaitu Simulasi Gladi Ruang Penerapan Standar Operasional Prosedur Penanganan Darurat Bencana Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 8 November 2019 di El Hotel Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang dihadiri oleh 60

orang peserta yang terdiri dari Kodim 0818 Malang Batu, TNI AU Malang, Polres Kabupaten Malang, Bulog, OPD Teknis Kabupaten Malang, BPBD Kabupaten Malang, BMKG Karangates, Bagian Hukum dan Bagian tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Malnag, Inspektorat, Perwakilan Kecamatan, Perwakilan Polsek Jajaran Polres Kabupaten Malang, Perwakilan Koramil Jajaran Kodim 0818 Malang Batu, Perwakilan Desa, dan Relawan/Potensi/PMI. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai terwujudnya peningkatan kapasitas yang memiliki wawasan dan pengetahuan terkait Sistem Penanganan Darurat Bencana sesuai Standar Operasional Prosedur Penanganan Darurat Bencana bagi peserta pelatihan yang tanggap dan memiliki respon cepat dan tepat dalam penanganan darurat bencana.

1.2 Penanganan Darurat Bencana.

Kegiatan ini telah dilaksanakan selama tahun 2019 sebanyak 119 kejadian bencana yang telah ditangani, antara lain : Kebakaran sebanyak 1 kejadian, Gempa Bumi sebanyak 2 kejadian, Banjir sebanyak 2 kejadian, Angin kencang sebanyak 38 kejadian, Longsor sebanyak 22 kejadian, dan Kekeringan sebanyak 54 kejadian. Selama tahun 2019 dalam penanganan bencana telah diberikan bantuan kepada korban bencana berupa paket sembako sebanyak 397 paket sembako, bronjong sebanyak 80 buah dan terpal sebanyak 27 buah.

1.3 Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Kegiatan ini adalah perekrutan personil Tim Reaksi Cepat (TRC-PB) yang dilaksanakan pada awal tahun 2019 dan dilakukan Pelatihan dan Pembekalan Personil dalam rangka Pembentukan TRC PB pada BPBD Kabupaten Malang yang dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 13 Juli Tahun 2019 di El Hotel Karangploso Kabupaten Malang yang diikuti oleh 20 orang terdiri dari Unsur TRC PB, Pusdalops dan Staf Sekretariat BPBD Kabupaten Malang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga TRC PB, Pusdalops dan bidang pada BPBD Kabupaten Malang dalam upaya memberikan pemahaman, wawasan, dan pengetahuan terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota TRC PB. Diharapkan pada saat melaksanakan tugas secara benar dan akuntabel. Untuk menunjang kegiatan anggota TRC dalam melaksanakan tugasnya,

maka diadakan pembelian Laptop sebanyak 5 unit, Printer Ink Jet sebanyak 3 unit, dan Komputer PC sebanyak 1 unit.

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar logistik dan Peralatan Bencana, dengan indikator :

2.1 Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan buffer stock sembako dan alat pergudangan meliputi pengadaan 600 paket sembako untuk korban bencana, 303 buah bronjong, pengadaan UPS sebanyak 1 unit, Printer Ink Jet sebanyak 1 unit, dan Komputer PC sebanyak 1 Unit.

2.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah yang Tanggap Bencana Tahun 2019 pada tanggal 30 Juli s/d 1 Agustus 2019 di Hotel Radho Syariah Sengkaling, Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang dihadiri oleh 60 orang peserta yang terdiri dari Perangkat Pemerintah Desa sebanyak 37 orang, Kasi Tramtib Kecamatan sebanyak 15 orang dan staf BPBD Kabupaten Malang sebanyak 8 orang. Tujuan dari kegiatan ini meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur daerah yang tanggap bencana, dalam upaya memberikan wawasan pengetahuan dan keterampilan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi di bidang kebencanaan.

Sasaran yang dicapai pada kegiatan ini adalah untuk :

- a. Meningkatkan pengetahuan konsep dasar penanggulangan bencana;
- b. Meningkatkan pengetahuan assessmen/kaji cepat untuk mengkaji cakupan lokasi, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana/infrastruktur;
- c. Pemahaman untuk menentukan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyintas secara cepat dan tepat;
- d. Meningkatkan pengetahuan pengolahan data, informasi, dan dokumen pelaporan;
- e. Memahami pengaturan serta alur distribusi bantuan; dan

f. Mengetahui sistem koordinasi dukungan dari pemerintah daerah setempat.

- Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
 - a. Adanya sarana prasarana dan ketersediaan logistik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
 - b. Meningkatnya kesadaran aparaturnya pemerintah daerah yang tanggap dalam Penanggulangan Bencana;
 - c. Adanya Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) dalam pelaksanaan assessment/kaji cepat pada saat terjadi bencana untuk menginventarisasi data kejadian bencana secara cepat dan tepat;
 - d. Dukungan lintas lembaga organisasi, potensi masyarakat dan dunia usaha dalam Penanggulangan Bencana.

- Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja Indikator Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil diselamatkan pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pencukupan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana untuk meminimalisasi jumlah korban;
 - b. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam pengelolaan penanggulangan bencana; dan
 - c. Meningkatkan sinergitas antara masyarakat, lintas lembaga dan lintas organisasi dalam penanganan bencana.

C. Pada Indikator Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana yang Berhasil Dioperasionalkan dengan target 100% tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan, Capaian 100% dapat dikatakan **berhasil** kegiatan ini didukung oleh Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana dengan kegiatan :

1. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

1.1 SDM Pahami Pendampingan Psikososial

Kegiatan ini dilaksanakan berupa Pelatihan Pendampingan Psikologi Pasca Bencana yang dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 6 Maret 2019

bertempat di Grage Hotel Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang dihadiri oleh 30 orang yang terdiri dari BPBD Kabupaten Malang dan Perangkat Desa yaitu Desa Sidoasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo, Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo, Desa Kidangbang Kecamatan Wajak, Desa Bringin Kecamatan Wajak, Desa Sidorejo Kecamatan Jabung, Desa Sumbersalam Kecamatan Wonosari dan Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang. Diharapkan peserta mampu mempraktekan ilmu yang didapat pada saat pasca bencana di wilayah masing-masing, khususnya dalam pendampingan psikososial.

1.2 Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana.

Kegiatan Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana melalui Pemulihan Rehabilitasi Sektor Ekonomi Pasca Bencana Kekeringan di Kabupaten Malang pada tanggal 9 s/d 10 September 2019 di Hotel Mirabel Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang diikuti oleh 30 orang terdiri dari BPBD Kabupaten Malang, Perangkat Desa dan Staf Kecamatan yaitu Desa Pagak dan Desa Sumberejo Kecamatan Pagak, Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo, Desa Ringinsari dan Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Diharapkan peserta mampu membangkitkan perekonomian pasca bencana melalui pengolahan bahan baku alternatif yang ada di daerah masing-masing.

2. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

2.1 Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana

Kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan panel tahan gempa menggunakan alat cetak yang telah ada dan terlaksana di tribulan IV Tahun 2019. Diharapkan panel yang ada akan digunakan sebagai fasilitas umum di daerah terdampak bencana. Ada 3 (tiga) unit panel ukuran 3m x 3m x 3m, misalnya untuk pos pantau kejadian bencana bagi relawan desa dan gabungan atau sebagai mushola desa. Pemasangan panel tahan gempa sebagai bentuk sosialisasi

bangunan ramah bencana di daerah terdampak bencana sehingga masyarakat semakin mengerti pentingnya konstruksi ramah bencana sebagai wujud pengurangan resiko bencana.

2.2 Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kegiatan ini dilaksanakan Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kekeringan pada tanggal 5 s/d 7 Agustus 2019 bertempat di Hotel Radho Syariah Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang dihadiri oleh 30 orang peserta yang terdiri dari BPBD, DPKPCK, DPU Binamarga, DPU SDA, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disperindagsar, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda serta Kecamatan terdampak kekeringan. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Jitupasna sebagai data dasar penyusunan Dokumen Renacana Akis Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Keterlibatan perangkat daerah teknis dalam penyusunan ini sebagai pihak pemangku kepentingan dalam pengajuan anggaran kegiatan selama dalam kurun waktu pasca bencana. Setelah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi disusun maka dilakukan uji publik tidak hanya untuk perangkat daerah dan daerah terdampak tetapi pihak dunia usaha sebagai wujud kepedulian dalam proses penanganan pasca bencana berbasis pengurangan resiko bencana.

2.3 Desa Siap Kelola Data SID untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pasca bencana serta tindak lanjut kegiatan Sistem Informasi Desa melalui workshop dan uji pemanfaatan data desa sebagai data kebencanaan. Operator desa diberikan apresiasi dan motivasi melalui studi replika dan tukar pengalaman dengan sesama pengolah data SID di Desa Sumber Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Diharapkan para operator desa mempunyai inovasi untuk keberlanjutan SID sebagai penyedia data dasar untuk data kebencanaan.

2.4 SDM Pahami Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA).

Kegiatan dilakukan dengan menggelar Workshop Manajemen Bencana pada tanggal 26 s/d 28 Februari 2019 bertempat di Hotel Radho Syariah Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang dihadiri oleh 50 orang terdiri dari BPBD, DPKPCK, DPU Binamarga, DPU SDA, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disperindagsar, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kominfo serta Dinas Koperasi. Maksud kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang penghitungan kebutuhan pasca bencana. Diharapkan pada saat bencana dan pasca bencana, Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana paham tentang proses penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana. Dalam hal ini melibatkan para operator desa untuk data dasar kebencanaan yang dibutuhkan dalam pengkajian kebutuhan pasca bencana.

- Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
 - a. Adanya sistem informasi desa yang memuat tentang data dasar kebencanaan sebagai data pendukung kegiatan pra bencana, saat tanggap bencana dan pasca bencana;
 - b. Adanya sosialisasi pemanfaatan bangunan ramah bencana berupa bangunan panel tahan gempa;
 - c. Sinergitas lintas OPD dalam perencanaan pasca bencana.

- Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja Indikator Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana yang Berhasil Dioperasionalkan pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan inovasi pemanfaatan data desa sebagai data dasar kebencanaan Kabupaten Malang;
 - b. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan perangkat daerah terkait untuk penyusunan Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung dengan program/kegiatan yang langsung memberikan dampak kepada masyarakat. Dimana program/kegiatan tersebut dilaksanakan mulai sebelum terjadinya bencana, saat bencana dan sesudah terjadinya bencana dengan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Program Kedaruratan dan Logistik dan Program Rehabilitasi – Rekonstruksi Pasca Bencana.

Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Malang, pemerintah perlu membuat rencana yang sistematis dan terukur dalam upaya penanggulangan bencana. Upaya yang dapat dilakukan baik dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Sehingga risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Malang dapat dikurangi.

Solusi yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejadian bencana adalah membuat Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulungan Bencana, Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat

bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Malang, pemerintah perlu membuat rencana yang sistematis dan terukur dalam upaya penanggulangan bencana. Upaya yang dapat dilakukan baik dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Sehingga risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Malang dapat dikurangi.

Solusi yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejadian bencana adalah membuat Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

D. SISTEMATIKA

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Capaian Kinerja Tahun 2019
- D. Sistematika

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Capaian Kinerja

- 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020
- 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019
- 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
 - 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
 - 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2020

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- Rencana Kinerja Tahun 2020
- Pengukuran Kinerja Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis yang disusun tersebut mengandung tujuan dan sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi: kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) OPD yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BPBD. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan Tujuan didasarkan pada pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang ke arah perubahan dari hasil analisis stratejik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai di masa datang. Dengan Tujuan yang

telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu Misi.

Sehubungan dengan itu, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menetapkan Tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

- Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal;
- Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik;
- Meningkatkan pemulihan Masyarakat dan sarana dan prasarana yang lebih baik;
- Mengoptimalkan tata kelola administrasi kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun secara berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Mengacu pada pengertian di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menetapkan Sasaran yang dapat disusun keterkaitan dengan Tujuan sebagai berikut :

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal;
- Penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik;
- Pemulihan Masyarakat dan sarana dan prasarana yang lebih baik;
- Tata kelola administrasi kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah suatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional.

Sehubungan dengan pengertian di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan Kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas desa tangguh bencana;
- Meningkatkan peran relawan, perempuan, kampus, LSM, dasawisma siaga bencana, pengenalan bencana pada sekolah, sekolah sadar bencana dalam menyiapkan masyarakat menghadapi bencana;
- Meningkatkan peran forum PRB dan Forum/KKN tematik;
- Meningkatkan peran dunia usaha dalam perannya dalam penanggulangan bencana;
- Meningkatkan kecepatan Assesment/Kaji Cepat;
- Meningkatkan anggaran untuk dukungan logistik dan peralatan;
- Meningkatkan pengadaan peralatan evakuasi korban bencana;
- Meningkatkan penguatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
- Meningkatkan penguatan jumlah sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat;
- Meningkatkan tertib administrasi kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Implementasi dari kebijakan di atas akan diwujudkan dalam bentuk produk surat-surat dinas ataupun pembuatan petunjuk operasional/prosedur tetap yang akan dijadikan sebagai Pedoman pelaksanaan kegiatan, Pengaturan mekanisme kegiatan lanjutan dan pendorong motivasi bagi staf dalam melaksanakan tugas.

PROGRAM

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu, dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan Program untuk mencapai tujuan dan sasaran,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan Tupoksi dari tiap Bidang dan Sekretariat;
- b. Memperhatikan Program Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi.

Program dimaksud oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah disusun sebagai berikut :

1. Program Kerja Lima Tahun :

Program Kerja Lima Tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang disesuaikan dengan Visi dan Misi sebagaimana telah digariskan dengan rinci sebagai berikut :

a. Program Kerja Pembinaan :

Dalam mengantisipasi Tujuan dan Sasaran serta Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka cukup beralasan untuk perlu dilakukan pembinaan dari dalam terhadap aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkesinambungan dengan maksud agar dapat mengimbangi perkembangan kemajuan yang terjadi dalam masyarakat.

b. Program Kerja Penyuluhan Masyarakat :

Sebagai tindak lanjut dari perwujudan tujuan akhir maka penyuluhan terhadap masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan secara terus-menerus.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana :

Faktor penunjang utama dalam operasional dan pelayanan serta pembinaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana, maka peningkatan sarana dan prasarana termasuk pilihan prioritas dalam mendukung peningkatan kinerja.

2. Program Kerja Tahunan :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- f. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana :
- Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana;
 - Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana;
- g. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana :
- Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana;
 - Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana;
- h. Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana :
- Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana;

- Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana;

B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	90,6%
		Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Diselamatkan	68%
		Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana Yang Berhasil Dioperasionalkan	47%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kedepan, secara teknis wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing bidang dan sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan *entry point* untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam hal pengumpulan data kinerja dimaksudkan agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektifitas. Untuk melakukan pengumpulan data kinerja secara efektif dan efisien perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Adapun pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dari segi pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah dibawah ini merupakan hasil kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam tahun anggaran 2020 yang mana capaian kinerja masing-masing proses penyusunan capaian kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 4 (empat) formulir pengukuran kinerja dalam pendekatan *activity basic management* pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukuran kinerja. 4 (empat) formulir tersebut adalah :

1. Matriks Renstra 2016-2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
3. Rencana Kerja Tahun 2020
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Dalam pengukuran kinerja, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	90,6%	90,6%	100%
		Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Diselamatkan	68%	68%	100%
		Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana Yang Berhasil Dioperasionalkan	47%	47%	100%

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	
			2020	2020	2019
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	90,6%	90,6%	81,3%
		Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Diselamatkan	68%	68%	85%
		Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana Yang Berhasil Dioperasionalkan	47%	47%	100%

Tabel. 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100%	90,6%	90,6%
Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Diselamatkan		95%	68%	71,6%	
Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana Yang Berhasil Dioperasikan		100%	47%	47%	

2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut, diketahui bahwa capaian semua indikator dapat dikatakan mengalami keberhasilan antara lain :

A. Pada Indikator Persentase Desa Tangguh Bencana dengan target 90,6%, tercapai 90,6% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana (33 komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen) capaian sebesar 100% dapat dikatakan **berhasil**, indikator ini didukung oleh Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, dengan kegiatan :

1. Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana dengan indikator :

1.1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi kebencanaan dilaksanakan di 57 wilayah sebagai berikut :

a. Bulan Januari : 4 wilayah di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Wirotaman Kecamatan Dampit, Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo, dan Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading;

b. Bulan Februari : 1 wilayah di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau;

- c. Bulan Maret : 14 wilayah di Desa Ngabab Kecamatan Pujon, Desa Pandansari Kecamatan Ngantang, Desa Langlang Kecamatan Singosari, Desa Bedali Kecamatan Lawang, Desa Bocek Kecamatan Karangploso, Desa Kluwut Kecamatan Wonosari, Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji, Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi, Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo, Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan, Desa Bantur Kecamatan Bantur, Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir, Desa Kidangbang Kecamatan Wajak, dan Desa Ngajum Kecamatan Ngajum;
- d. Bulan April : 12 wilayah di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang, Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung, Desa Kalipare Kecamatan Kalipare, Desa Tumpang Kecamatan Tumpang, Desa Sumberporong Kecamatan Lawang, Desa Dengkol Kecamatan Singosari, Desa Pakis Kecamatan Pakis, Desa Kemantren Kecamatan Jabung, Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran, Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Kromengan Kecamatan Kromengan, dan Desa Tajinan Kecamatan Tajinan;
- e. Bulan September : 12 wilayah di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Pagak Kecamatan Pagak, Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung, Desa Srigonco Kecamatan Bantur, Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare, Desa Wonorejo Kecamatan Singosari, Desa Urek Urek Kecamatan Gondanglegi, Desa Jabung Kecamatan Jabung, Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan, Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon, Desa Sidoluhur, dan Kecamatan Lawang;
- f. Bulan Oktober : 6 wilayah di Desa Argoyuwono Kecamatan Ampelgading, Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso, Desa Sumbertangkil Kecamatan Tirtoyudo, Desa Duwet Kecamatan Tumpang, Desa Asrikaton Kecamatan Pakis, dan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo; dan
- g. Bulan November : 8 wilayah di Desa Pondok Agung Kecamatan Kasembon, Desa Wono Agung Kecamatan Tirtoyudo, Desa Gedangan Kecamatan Gedangan, Desa Taman Asri Kecamatan

Ampelgading, Desa Tlogorejo Kecamatan Pagak, Desa Sumberbening Kecamatan Bantur, Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dan Desa Banjararum Kecamatan Singosari.

1.2 Pengurangan Resiko Bencana.

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2025 dilakukan oleh jasa konsultan CV. Irama Tembang Elok pada bulan November-desember 2020.

Dokumen RPB Covid-19 Kabupaten Malang merupakan rencana dan panduan yang bersifat lintas sektor dan lintas bidang dalam rangka penanggulangan bencana yang masa berlaku selama 5 (lima) tahun (2020-2025). RPB Covid-19 Kabupaten Malang diharapkan dapat menjadi bagian yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Malang pada prioritas pembangunan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang.

Tujuan penyusunan RPB Covid-19 Kabupaten Malang adalah:

1. Panduan daerah dalam penanggulangan bencana terkait pengaruh utama akan isu dan upaya penanggulangan bencana di dalam program kerja Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Kabupaten Malang;
3. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Malang menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah;
4. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Melindungi masyarakat di wilayah Kabupaten Malang dari ancaman bencana.

RPB Covid-19 Kabupaten Malang mempunyai sasaran sebagai pedoman bagi pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang dan masyarakat. Sedangkan sasaran substansial dari RPB Covid-19 Kabupaten Malang adalah:

1. Terarah dan sinergisnya langkah-langkah terkait penanggulangan bencana di tataran Pemerintah Kabupaten Malang serta pemangku kepentingan lainnya;
2. Adanya penurunan resiko bencana serta peningkatan ketahanan masyarakat dan lingkungan fisik di wilayah Kabupaten Malang terhadap ancaman bencana yang potensial terjadi;
3. Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1.3 Mitigasi Non struktural

Kegiatan Mitigasi Non Struktural Kabupaten Malang Tahun 2020 melalui Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Ancaman Gempa Bumi di Kabupaten Malang Tahun 2020 yang dilaksanakan selama 3 (tiga) kali pertemuan yang bertempat di Hotel Syariah Radho Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari Inspektorat, Bappeda, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU SDA, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, DP3A, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPKPCK, Satpol PP, RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang, Bagian Hukum Setda, PMI dan BPBD Kabupaten Malang.

Pertemuan pertama pada tanggal 19 November 2020 bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal potensi gempa yang mungkin terjadi di Kabupaten Malang, melakukan perkiraan dampak yang terjadi akibat gempa yang berpotensi terjadi, dan menyusun rencana awal respon darurat ketika terjadi gempa. Hasil yang diharapkan adalah adanya gambaran awal skenario kejadian gempa yang berpotensi di Kabupaten Malang, adanya gambaran awal skenario dampak dan langkah penanganan bencana yang terjadi akibat gempa, dan adanya dokumen rencana kontijensi untuk merespon secara cepat dan tepat dampak gempa.

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 yang bertujuan untuk mendapatkan review tentang draft nol Dokumen Rencana Kontijensi, melakukan review perkiraan dampak yang terjadi akibat gempa yang berpotensi terjadi, dan melakukan review rencana awal respon darurat ketika suatu saat terjadi gempa. Hasil yang

dicapai adalah adanya draft nol dokumen rencana kontijensi yang telah di review oleh peserta kegiatan.

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 yang bertujuan untuk melegalkan dokumen rencana kontijensi ancaman gempa bumi di Kabupaten Malang 2020.

1.4 Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH) yang dilaksanakan di 7 Sekolah sebagai berikut :

- a. Bulan Februari : 5 Sekolah yaitu SDA Ar Rohmah Kecamatan Dau, SDN I Pojok Kecamatan Dampit, SDN I Sumberagung Kecamatan Ngantang, SDN I Kaumrejo Kecamatan Ngantang, dan SDN IV Wandanpuro Kecamatan Bululawang; dan
- b. Bulan Maret : 2 Sekolah yaitu MI Nasyrul Ulum Bocek Kecamatan Karangploso, dan SDN II Wonorejo Kecamatan Singosari.

2. Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana dengan indikator :

2.1 Desa Tangguh Bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana yaitu Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo pada tanggal 16 s/d 18 Desember 2020; Desa Gunungjati Kecamatan Jabung pada tanggal 23 s/d 25 Desember 2020; dan Desa Petungsewu Kecamatan Dau pada tanggal 28 s/d 30 Desember 2020. Dalam setiap kegiatan pelatihan dihadiri tim pokja destana sebanyak 30 orang. Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana oleh BPBD Provinsi Jawa Timur yaitu Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan pada tanggal 26 s/d 27 dan 29 Februari 2020 dan Desa Bocek Kecamatan Karangploso pada tanggal 2 s/d 4 Maret 2020. Desa Tangguh Bencana yang terbentuk diharapkan masyarakat mampu menghindari dan menyelamatkan diri dari resiko bencana. Bahkan ke depan mereka juga mampu mencegah kemungkinan terjadinya bencana melalui kegiatan pengurangan resiko bencana.

2.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pengadaan dan pembelian rambu-rambu peringatan dan jalur evakuasi sebanyak 50 buah untuk diberikan kepada daerah rawan bencana.

2.3 Pembentukan Pusat Pengendalian dan Operasi (PUSDALOPS)

Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan mengadakan rapat koordinasi terkait tugas pokok dan fungsi Pusdalops serta mengadakan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas Pusdalops berupa :

- a. Smart Phone sebanyak 1 Unit;
- b. Laptop sebanyak 2 Unit; dan
- c. Televisi LED (32 inchi standar).

- Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
 - a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi tentang kebencanaan terhadap semua lapisan masyarakat, lintas lembaga dan organisasi;
 - b. Sinergitas antara masyarakat, lintas lembaga, lintas organisasi dan lintas OPD dalam pengelolaan Penanggulangan Bencana;
 - c. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak ketiga secara terpadu dalam rangka perencanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja Indikator Persentase Desa Tangguh Bencana pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan informasi kebencanaan terhadap akademisi dan dunia usaha;
 - b. Melakukan pendampingan kepada desa-desa dalam rangka pembentukan desa tangguh bencana (Destana) secara mandiri;
 - c. Penambahan sarana prasaran dan rambu-rambu informasi Penanggulangan Bencana;
 - d. Berjalannya sistem Informasi kebencanaan terpadu Tim PUSDALOPS (Pusat Pengendalian dan Operasi) dalam pengelolaan data, penerimaan informasi dan penyebarluasan informasi penanggulangan bencana; dan
 - e. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana.

B. Pada Indikator Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Diselamatkan dengan target 68%, tercapai 68% perhitungan ini berdasarkan

pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 151 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 151 kejadian) Capaian 100% dapat dikatakan **berhasil**, indikator ini didukung oleh Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan kegiatan :

1. Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana, dengan indikator:

1.1 Penanganan Darurat Bencana.

Kegiatan ini telah dilaksanakan selama tahun 2020 sebanyak 151 kejadian bencana yang telah ditangani, antara lain : Gempa Bumi sebanyak 19 kejadian, Banjir sebanyak 15 kejadian, Angin kencang sebanyak 42 kejadian, Longsor sebanyak 60 kejadian, dan Pohon tumbang sebanyak 15 kejadian. Selama tahun 2020 dalam penanganan bencana telah diberikan bantuan kepada korban bencana berupa paket sembako sebanyak 621 paket sembako dan bronjong sebanyak 535 buah.

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar logistik dan Peralatan Bencana, dengan indikator :

2.1 Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan buffer stock sembako yaitu pengadaan 600 paket sembako untuk diberikan kepada korban terdampak bencana.

➤ Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- a. Adanya sarana prasarana dan ketersediaan logistik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
- b. Meningkatnya kesadaran aparaturnya pemerintah daerah yang tanggap dalam Penanggulangan Bencana;
- c. Meningkatnya kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) dalam pelaksanaan assessment/kaji cepat pada saat terjadi bencana untuk menginventarisasi data kejadian bencana secara cepat dan tepat;
- d. meningkatkan koordinasi lintas lembaga organisasi, potensi masyarakat dan dunia usaha dalam Penanggulangan Bencana.

- Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja Indikator Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil diselamatkan pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana untuk meminimalisasi jumlah korban;
 - b. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Tim Reaksi Cepat dan Peran serta Aparatur dalam pengelolaan penanggulangan bencana; dan
 - c. Meningkatkan sinergitas antara masyarakat, lintas lembaga dan lintas organisasi dalam penanganan bencana.

- C. Pada Indikator Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana yang Berhasil Dioperasionalkan dengan target 47% tercapai 47% perhitungan ini berdasarkan, Capaian 100% dapat dikatakan **berhasil** kegiatan ini didukung oleh Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana dengan kegiatan :
 1. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana dengan indikator kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1 SDM Pahami Pendampingan Psikososial

Kegiatan ini dilaksanakan berupa Pendampingan Psikososial Pasca Bencana yang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 12 Maret 2020 bertempat di Hotel Trio Indah 2 Malang yang dihadiri oleh 30 orang terdiri dari BPBD Kabupaten Malang dan Perangkat Desa yaitu Desa Dengkol Kecamatan Singosari, Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari, Desa Tegalwaru Kecamatan Dau, Desa Mulyoagung Kecamatan Dau, Desa Asrikaton Kecamatan Pakis, Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis, Desa Kemiri Kecamatan Jabung, Desa Gunungjati Kecamatan Jabung, Desa Bokor Kecamatan Tumpang, Desa Tumpang Kecamatan Tumpang, Desa Ngijo Kecamatan Karangploso dan Desa Ngenep Kecamatan Karangploso. Kegiatan ini diharapkan mampu mencegah terjadinya masalah psikologis serius dan mencegah munculnya perilaku tampilan kondisi kesehatan mental negatif yang disebabkan oleh bencana atau situasi kritis. Diharapkan peserta mampu mempraktekan ilmu yang didapat

pada pasca bencana di wilayah masing-masing, khususnya dalam pendampingan psikososial.

2. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

2.1 Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana

Pemulihan rekonstruksi pasca bencana sebanyak 1 (satu) unit pada tahun ini berupa Dokumen Jitu Pasna (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) sebagai dasar penyusunan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Alih kegiatan menjadi Dokumen Jitupasna dikarenakan refocusing sehingga kegiatan yang semestinya dilakukann oleh Tim Jitupasna di tribulan 1 dan 2 dilaksanakan pada tribulan 3 dan 4. Proses penyusunan dilakukan secara daring dengan anggota tim Jitupasna dari Perangkat Daerah terkait, dalam hal ini dominan dari Dinas Koperasi dan UMKM Karena materi yang dibahas pada Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai kelanjutan Dokumen Jitupasna adalah berkelanjutan UKM daerah terdampak bencana non alam Covid 19.

Pelaksanaan Jitupasna diperoleh dari penilaian kerusakan dan kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan meningkatnya risiko untuk selanjutnya dijadikan dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Covid-19. Untuk itu maka basisnya diambil sampling dari 3 dalam 3 daerah subsektor wilayah pengembangan di Kabupaten Malang yaitu Desa yaitu Desa Dilem Kecamatan Kepanjen, Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading, dan Desa Bedali Kecamatan Lawang. Hal ini dilakukan mengingat luasan akibat dan dampak Covid-19 meliputi seluruh daerah di Kabupaten Malang. Maka berdasarkan pertimbangan cukup di ambil 3 Desa dalam 3 daerah sub sektor wilayah pengembangan tersebut, yang mana Kabupaten Malang memiliki 6 daerah subsektor wilayah pengembangan. Ini dilakukan karena luasan akibat dan dampak bencana ini sangat luas di satu sisi pemulihan pasca bencana wajib menempatkan masyarakat korban bencana dan lingkungannya sebagai sasaran prioritas pemulihan pasca bencana.

2.2 Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Keterbatasan proses pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sedianya penyusunan dilakukan secara tatap muka antara BPBD, perangkat daerah terkait dan fasilitator serta konsultan, dikarenakan pandemi Covid-19 oleh karena itu pertemuan dilakukan secara daring, penyusunan dokumen melalui proses penggalan data di lapangan dengan secara daring.

2.3 SDM Pengelola Data Kebencanaan untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Sumber daya manusia pengelola data kebencanaan untuk pengurangan resiko bencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sejumlah 20 orang yaitu operator website desa selaku pengelola data kebencanaan dan Dinas Kominfo Kabupaten Malang dalam rangka rapat koordinasi pendahuluan sebagai penyedia data dasar untuk data kebencanaan. Guna memaksimalkan website desa dalam penyusunan dan penyediaan basis data kebencanaan dalam pengurangan resiko bencana.

2.4 SDM Paham Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA).

Kegiatan dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi tim kajian kebutuhan pasca bencana (Jitu Pasna) pada bulan Maret 2020 bertempat di Ruang Rapat BPBD Kabupaten Malang yang dihadiri oleh 40 orang terdiri dari beberapa pejabat struktural BPBD dan staf, Bappeda, Dinas Kesehatan, PU Bina Marga, PU SDA, DPKPCK, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Kelautan serta para operator SID dari desa-desa yang telah mendapat pelatihan Sistem Infomasi Desa sebagai data kebencanaan. Kegiatan diharapkan pada saat bencana dan pasca bencana, Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana paham tentang proses penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana. Selain itu juga pengadaan rompi untuk personil *check point* pada fase pembatasan social berskala besar (PSBB) Kabupaten Malang.

- Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
 - a. Penyusunan Dokumen Jitupasna dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebagai wujud sinergi antar perangkat daerah dengan mengandalkan teknologi dalam pengumpulan data dan tatap muka melalui daring;
 - b. Dokumen Jitupasna merupakan komponen akibat bencana yang dikaji terdiri dari penilaian kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko bencana. Sebagai catatan bahwa dalam bencana pandemic Covid-19 ini tidak ada dampak kerusakan infrastruktur seperti bencana ;
 - c. Sinergitas lintas OPD dalam perencanaan pasca bencana.

- Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja Indikator Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana yang Berhasil Dioperasionalkan pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan inovasi pemanfaatan data desa sebagai data dasar kebencanaan Kabupaten Malang dengan melakukan inovasi bersama Dinas Kominfo Kabupaten Malang dengan sebagai penyedia website desa serta akan melakukan integrasi untuk Sistem Informasi Desa sebagai data dasar kebencanaan;
 - b. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan perangkat daerah terkait untuk penyusunan Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan dengan BPBD Kota Wisata Batu untuk keberlanjutan sosialisasi rumah panel sebagai rumah ramah bencana.

Pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di dukung dengan program dan kegiatan yang langsung memberikan dampak kepada masyarakat. Dimana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan mulai sebelum terjadinya bencana, saat bencana dan sesudah terjadinya bencana dengan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Program Kedaruratan dan

Logistik Penanggulangan Bencana dan Program Rehabilitasi – Rekonstruksi Pasca Bencana.

Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Malang, pemerintah perlu membuat rencana yang sistematis dan terukur dalam upaya penanggulangan bencana. Upaya yang dapat dilakukan baik dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan, meneruskan dan menyebarkan informasi dari Lembaga-lembaga penyedia informasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sehingga risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Malang dapat dikurangi.

Solusi yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejadian bencana adalah membuat Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan membuat sarana informasi berbasis teknologi informasi yang menjangkau semua lini sektor dan seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dalam penanggulangan bencana di wilayah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. APBD yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang saat ini dirasa masih sangat kurang dan perlu ada penambahan dana karena dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana yang berguna untuk pencegahan/preventif terhadap bencana, penanganan bencana yang responsif dan pemulihan dampak bencana yang terjadi.

Tabel 3.4
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	476.800.200,00	21,50%
		Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Diselamatkan	1.289.363.700,00	37,96%
		Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana Yang Berhasil Dioperasionalkan	299.236.140,00	12,29%

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	90,6%	90,6%	100%	476.800.200,00	471.729.540,00	98,94%
	Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil diselamatkan	68%	68%	100%	1.289.363.700,00	872.648.905,00	67,68%
	Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana Yang Berhasil Dioperasikan	47%	47%	100%	299.236.140,00	294.858.840,00	98,54%

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	90,6%	98,94%	0,011
		Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Diselamatkan	68%	67,68%	0,323
		Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana Yang Berhasil Dioperasionalkan	47%	98,54%	0,015

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja anggaran yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana	246.155.700,00	241.521.040,00	98,12%
		Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	230.644.500,00	230.208.500,00	99,81%
2	Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana	1.151.363.700,00	734.648.905,00	63,81%
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana	138.000.000,00	138.000.000,00	100%
3	Rehabilitasi – Rekonstruksi Pasca Bencana	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana	57.015.500,00	57.015.500,00	100%
		Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana	242.220.640,00	237.843.340,00	98,19%
4	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.200.000,00	86,67%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.440.000,00	33.608.025,00	67,98%
		Penyediaan Administrasi Keuangan	836.003.800,00	833.690.457,00	99,72%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.091.199,81	22.082.100,00	99,96%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.300.250,00	30.299.200,00	99,99%

1	2	3	4	5	6
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.514.500,00	4.511.500,00	99,93%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.568.098,00	132.814.000,00	97,25%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.665.000,00	7.665.000,00	100%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	12.862.500,00	12.862.500,00	100%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	78.481.000,00	78.480.450,00	99,99%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	139.295.000,00	139.295.000,00	100%
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.070.700,00	42.779.000,00	99,32%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	155.342.000,00	154.342.000,00	99,36%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	191.128.700,00	156.793.100,00	82,04%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.800.000,00	5.800.000,00	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	980.000,00	980.000,00	100%

1	2	3	4	5	6
6	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	0,00	0,00	0%
7	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,00	0,00	0%
8	Peningkatan pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.934.900,00	89.434.900,00	99,44%
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2.214.600,00	2.214.600,00	100%
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.644.000,00	2.644.000,00	100%

C. PRESTASI TAHUN 2020

Pada Tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tidak mendapatkan prestasi karena tidak berpartisipasi dalam kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendukung terwujudnya *Good Governance*. Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal, oleh karena itu penyajian informasi dalam Laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Dari hasil penilaian keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 3 (tiga) indikator sasaran berikut capaian kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang adalah 100% sehingga termasuk kategori ***Sangat Berhasil***.

Hasil Evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, hal ini berarti bahwa kinerja dari pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan Kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya peralatan penanggulangan bencana;
2. Kurangnya koordinasi antar lintas lembaga, OPD dan organisasi kemanusiaan;
3. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung pusat data pengendalian operasional pengelolaan data kebencanaan dan informasi kebencanaan; dan
4. Belum terlatihnya satuan tim dalam percepatan pemberian informasi dan penanggulangan bencana.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan peralatan penanggulangan bencana yang memadai dalam penanganan kejadian bencana;

2. Peningkatan koordinasi dengan pelatihan bersama sistem komando, kebutuhan dasar logistik kejadian bencana, workshop, gladi lapang dan sebagainya;
3. Adanya Sistem Informasi Teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat dalam rangka percepatan penanganan bencana; dan
5. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis serta mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan semua lapisan masyarakat serta instansi/lembaga pemerhati bencana.

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan *entry point* terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, Laporan Kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi. Selain itu Laporan Kinerja dapat juga dijadikan bahan acuan untuk menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan harapan akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan, menjalankan kegiatan sesuai program/kebijakan sehingga tujuan organisasi dapat terwujud. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Drs. BAMBANG ISTIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198602 1 003

TABEL 5.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021						
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Tata Kelola Administrasi Umum dan Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Umum, Kinerja Aparatur yang Lebih Baik	Presentase Administrasi Umum dan Kinerja Aparatur yang Dikelola	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	757.653.900		100%	898.566.800		100%	1.522.170.400		100%	1.674.464.300		100%	1.842.234.740		100%	6.695.090.140		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2203 Surat	5.580.000	APBD Kabupaten	2525 Surat	6.000.000	APBD Kabupaten	2525 Surat	6.600.000	APBD Kabupaten	2600 Surat	7.300.000	APBD Kabupaten	2625 Surat	8.000.000	APBD Kabupaten	7750 Surat	33.480.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening	18.480.000	APBD Kabupaten	36 Rekening	21.240.000	APBD Kabupaten	36 Rekening	43.164.000	APBD Kabupaten	36 Rekening	47.480.400	APBD Kabupaten	36 Rekening	52.228.440	APBD Kabupaten	108 Rekening	182.592.840	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	255 OB	262.515.000	APBD Kabupaten	23 OB	341.940.000	APBD Kabupaten	22 OB	363.973.000	APBD Kabupaten	22 OB	400.370.000	APBD Kabupaten	22 OB	440.407.000	APBD Kabupaten	66 OB	1.809.205.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	15.600.000	APBD Kabupaten	1 OB	21.600.000	APBD Kabupaten	1 OB	23.760.000	APBD Kabupaten	1 OB	26.136.000	APBD Kabupaten	1 OB	28.749.600	APBD Kabupaten	3 OB	115.845.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020						Tahun 2021		
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				Target	Rp.	Sbr. Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1275 Jenis	43.097.400	APBD Kabupaten	51 Jenis	44.346.400	APBD Kabupaten	51 Jenis	48.711.000	APBD Kabupaten	51 Jenis	53.582.100	APBD Kabupaten	51 Jenis	58.941.000	APBD Kabupaten	153 Jenis	248.677.900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3120 Jenis	48.000.000	APBD Kabupaten	12 Jenis	47.787.900	APBD Kabupaten	12 Jenis	52.567.000	APBD Kabupaten	12 Jenis	57.823.700	APBD Kabupaten	12 Jenis	63.607.000	APBD Kabupaten	36 Jenis	269.785.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	119 Jenis	3.791.000	APBD Kabupaten	7 Jenis	4.535.000	APBD Kabupaten	7 Jenis	4.989.000	APBD Kabupaten	7 Jenis	5.488.000	APBD Kabupaten	7 Jenis	6.037.000	APBD Kabupaten	21 Jenis	24.840.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan (jenis)	2190 Jenis	7.665.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	7.665.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	8.432.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	9.275.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	10.203.000	APBD Kabupaten	9 Jenis	43.240.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	990 Pack	23.512.500	APBD Kabupaten	1050 Pack	27.562.500	APBD Kabupaten	1060 Pack	30.320.000	APBD Kabupaten	1060 Pack	33.352.000	APBD Kabupaten	1060 Pack	36.688.000	APBD Kabupaten	3180 Pack	151.435.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	420 Orang	210.993.000	APBD Kabupaten	35 Orang	163.335.000	APBD Kabupaten	34 Orang	206.745.000	APBD Kabupaten	34 Orang	227.420.000	APBD Kabupaten	34 Orang	250.162.000	APBD Kabupaten	102 Orang	1.058.655.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					11. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	260 Orang	118.420.000	APBD Kabupaten	16 Orang	212.555.000	APBD Kabupaten	34 Orang	186.846.000	APBD Kabupaten	34 Orang	205.531.000	APBD Kabupaten	34 Orang	226.085.000	APBD Kabupaten	102 Orang	949.437.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	17 Jenis	5.876.000	APBD Kabupaten	17 Jenis	6.500.000	APBD Kabupaten	17 Jenis	7.500.000	APBD Kabupaten	51 Jenis	19.876.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020						Tahun 2021		
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				Target	Rp.	Sbr. Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	10 Unit	540.187.400	APBD Kabupaten	10 Unit	594.206.100	APBD Kabupaten	10 Unit	653.626.700	APBD Kabupaten	30 Unit	1.788.020.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	225.888.700		100%	176.543.700		100%	332.940.400		100%	366.234.538		100%	402.858.700		100%	1.504.466.038	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	29 Unit	149.921.700	APBD Kabupaten	17 Unit	158.981.700	APBD Kabupaten	7 Unit	174.880.000	APBD Kabupaten	7 Unit	192.368.000	APBD Kabupaten	7 Unit	211.605.000	APBD Kabupaten	21 Unit	887.756.400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					15. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	3 Jenis	63.192.600	APBD Kabupaten	3 Jenis	69.511.838	APBD Kabupaten	3 Jenis	76.463.100	APBD Kabupaten	9 Jenis	209.167.538	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					16. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	8 Jenis	62.437.000	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	8 Jenis	75.548.800	APBD Kabupaten	8 Jenis	83.103.700	APBD Kabupaten	8 Jenis	91.414.100	APBD Kabupaten	24 Jenis	312.503.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	16 Jenis	5.342.000	APBD Kabupaten	16 Jenis	5.877.000	APBD Kabupaten	16 Jenis	6.465.000	APBD Kabupaten	16 Jenis	7.111.500	APBD Kabupaten	48 Jenis	24.795.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Unit	1.080.000	APBD Kabupaten	5 Unit	1.800.000	APBD Kabupaten	5 Unit	1.980.000	APBD Kabupaten	5 Unit	2.178.000	APBD Kabupaten	5 Unit	2.396.000	APBD Kabupaten	15 Unit	9.434.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020						Tahun 2021		
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				Target	Rp.	Sbr. Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	215 Jenis	9.440.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	5.800.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	6.380.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	7.018.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	7.720.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	36.358.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	43 Jenis	3.010.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	4.620.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	5.082.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	5.590.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	6.149.000	APBD Kabupaten	9 Jenis	24.451.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	26.400.000		100%	48.000.000		100%	52.800.000		100%	58.100.000		100%	63.888.000		100%	249.188.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					21. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	33 Stel	26.400.000	APBD Kabupaten	80 Stel	48.000.000	APBD Kabupaten	80 Stel	52.800.000	APBD Kabupaten	80 Stel	58.100.000	APBD Kabupaten	80 Stel	63.888.000	APBD Kabupaten	240 Stel	249.188.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	11.340.000		100%	10.300.000		100%	22.979.000		100%	25.280.000		100%	27.808.000		100%	97.707.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					22. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	13 Orang	11.340.000	APBD Kabupaten	11 Orang	10.300.000	APBD Kabupaten	13 Orang	22.979.000	APBD Kabupaten	13 Orang	25.280.000	APBD Kabupaten	13 Orang	27.808.000	APBD Kabupaten	39 Orang	97.707.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	34.183.100		100%	56.185.500		100%	129.173.400		100%	142.452.500		100%	156.698.500		100%	518.693.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 Buku	21.078.100	APBD Kabupaten	7 Buku	43.424.400	APBD Kabupaten	8 Buku	115.000.000	APBD Kabupaten	8 Buku	127.000.000	APBD Kabupaten	8 Buku	139.700.000	APBD Kabupaten	24 Buku	446.202.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020						Tahun 2021			
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				Target	Rp.	Sbr. Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
					24. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	6.546.000	APBD Kabupaten	1 Buku	6.622.700	APBD Kabupaten	1 Buku	6.748.400	APBD Kabupaten	1 Buku	7.285.000	APBD Kabupaten	1 Buku	8.013.500	APBD Kabupaten	3 Buku	35.215.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					25. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	6.559.000	APBD Kabupaten	1 Buku	6.138.400	APBD Kabupaten	1 Buku	7.425.000	APBD Kabupaten	1 Buku	8.167.500	APBD Kabupaten	1 Buku	8.985.000	APBD Kabupaten	3 Buku	37.274.900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
2.	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif	Persentase Desa Tangguh Bencana	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Jumlah Korban Bencana Yang Berhasil Diselamatkan	VI. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	0%	0		79%	1.140.488.000		81%	1.579.990.000		83%	1.764.494.000		85%	1.960.944.000		85%	6.445.916.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					26. Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Dokumen Laporan Hasil SKM Pelayanan Kebencanaan	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Mitigasi Non Struktural Yang Dilaksanakan	0 Paket	0	APBD Kabupaten	1 Paket	104.860.000	APBD Kabupaten	1 Paket	115.346.000	APBD Kabupaten	1 Paket	126.880.000	APBD Kabupaten	1 Paket	139.568.000	APBD Kabupaten	3 Paket	486.654.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENASEKOLAH)	0 Sekolah	0	APBD Kabupaten	28 Sekolah	94.230.000	APBD Kabupaten	25 Sekolah	99.000.000	APBD Kabupaten	25 Sekolah	108.900.000	APBD Kabupaten	25 Sekolah	119.790.000	APBD Kabupaten	75 Sekolah	421.920.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	1 Dokumen	95.770.000	APBD Kabupaten	1 Dokumen	110.000.000	APBD Kabupaten	1 Dokumen	121.000.000	APBD Kabupaten	1 Dokumen	133.100.000	APBD Kabupaten	3 Dokumen	459.870.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020						Tahun 2021		
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				Target	Rp.	Sbr. Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	0 Wilayah	0	APBD Kabupaten	33 Wilayah	80.800.000	APBD Kabupaten	33 Wilayah	88.880.000	APBD Kabupaten	33 Wilayah	97.768.000	APBD Kabupaten	33 Wilayah	107.545.000	APBD Kabupaten	99 Wilayah	374.993.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	0 Sekolah/Madrasah	0	APBD Kabupaten	0 Sekolah/Madrasah	0	APBD Kabupaten	4 Sekolah/Madrasah	130.450.000	APBD Kabupaten	4 Sekolah/Madrasah	145.000.000	APBD Kabupaten	4 Sekolah/Madrasah	159.500.000	APBD Kabupaten	12 Sekolah/Madrasah	434.950.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					27. Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Mitigasi Struktural Yang Dilaksanakan	0 Meter	0	APBD Kabupaten	50 Meter	115.375.000	APBD Kabupaten	50 Meter	126.915.000	APBD Kabupaten	50 Meter	139.607.000	APBD Kabupaten	50 Meter	153.568.000	APBD Kabupaten	150 Meter	535.465.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Picket Kesiapsiagaan Bencana	0 Orang	0	APBD Kabupaten	40 Orang	284.240.000	APBD Kabupaten	40 Orang	317.240.000	APBD Kabupaten	40 Orang	348.964.000	APBD Kabupaten	40 Orang	383.860.000	APBD Kabupaten	120 Orang	1.334.304.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	0 Paket	0	APBD Kabupaten	175 Paket	182.508.000	APBD Kabupaten	175 Paket	195.177.000	APBD Kabupaten	175 Paket	214.695.000	APBD Kabupaten	175 Paket	236.165.000	APBD Kabupaten	525 Paket	828.545.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Desa Tangguh Bencana	0 Desa	0	APBD Kabupaten	3 Desa	132.705.000	APBD Kabupaten	3 Desa	146.982.000	APBD Kabupaten	3 Desa	161.680.000	APBD Kabupaten	3 Desa	177.848.000	APBD Kabupaten	9 Desa	619.215.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALO PS) yang dibentuk	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	1 Unit	250.000.000	APBD Kabupaten	1 Unit	300.000.000	APBD Kabupaten	1 Unit	350.000.000	APBD Kabupaten	1 Unit	900.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					VII. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Bencana (%)	0%	0		100%	2.148.000.000		100%	2.727.800.000		100%	3.001.580.000		100%	3.301.738.000		100%	11.179.118.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					28. Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana	Jumlah Penanganan Kedaruratan	0 Kali	0	APBD Kabupaten	51 Kali	1.791.008.500	APBD Kabupaten	51 Kali	1.988.800.000	APBD Kabupaten	51 Kali	2.187.680.000	APBD Kabupaten	51 Kali	2.406.448.000	APBD Kabupaten	153 Kali	8.373.936.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020						Tahun 2021			
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				Target	Rp.	Sbr. Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
						Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	0 Orang	0	APBD Kabupaten	53 Orang	126.141.500	APBD Kabupaten	40 Orang	110.000.000	APBD Kabupaten	40 Orang	121.000.000	APBD Kabupaten	40 Orang	133.100.000	APBD Kabupaten	120 Orang	490.241.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk	0 Tim	0	APBD Kabupaten	0 Tim	0	APBD Kabupaten	1 Tim	365.000.000	APBD Kabupaten	1 Tim	402.000.000	APBD Kabupaten	1 Tim	442.200.000	APBD Kabupaten	1 Tim	1.209.200.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					29. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana	0 Orang	0	APBD Kabupaten	50 Orang	80.850.000	APBD Kabupaten	50 Orang	99.000.000	APBD Kabupaten	50 Orang	108.900.000	APBD Kabupaten	50 Orang	119.790.000	APBD Kabupaten	150 Orang	408.540.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	0 Paket	0	APBD Kabupaten	400 Paket	150.000.000	APBD Kabupaten	400 Paket	165.000.000	APBD Kabupaten	400 Paket	182.000.000	APBD Kabupaten	400 Paket	200.200.000	APBD Kabupaten	1200 Paket	697.200.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana Yang Berhasil Dioperasikan	VIII. Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	0%	0		81%	633.700.000		85%	1.449.462.000		87%	1.586.514.000		90%	1.745.166.000		90%	5.414.842.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					30. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	0 Orang	0	APBD Kabupaten	30 Orang	53.241.000	APBD Kabupaten	30 Orang	59.115.000	APBD Kabupaten	30 Orang	65.030.000	APBD Kabupaten	30 Orang	71.533.000	APBD Kabupaten	90 Orang	248.919.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	1 Dokumen	51.755.000	APBD Kabupaten	1 Dokumen	56.062.000	APBD Kabupaten	1 Dokumen	61.669.000	APBD Kabupaten	1 Dokumen	67.836.000	APBD Kabupaten	3 Dokumen	237.322.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	0 Kegiatan	0	APBD Kabupaten	1 Kegiatan	33.605.000	APBD Kabupaten	2 Kegiatan	75.000.000	APBD Kabupaten	2 Kegiatan	85.000.000	APBD Kabupaten	2 Kegiatan	93.500.000	APBD Kabupaten	6 Kegiatan	287.105.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020						Tahun 2021		
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				Target	Rp.	Sbr. Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					31. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	0 Unit	0	APBD Kabupaten	1 Unit	143.020.000	APBD Kabupaten	3 Unit	500.000.000	APBD Kabupaten	3 Unit	550.000.000	APBD Kabupaten	3 Unit	605.000.000	APBD Kabupaten	9 Unit	1.798.020.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah Desa Siap Kelola Data SID untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Desa Siap Kelola Data SID untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0 Desa	0	APBD Kabupaten	9 Desa	101.597.900	APBD Kabupaten	0 Desa	0	APBD Kabupaten	0 Desa	0	APBD Kabupaten	0 Desa	0	APBD Kabupaten	0 Desa	101.597.900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah SDM Paham JITU PASNA	Jumlah SDM Paham JITU PASNA	0 Orang	0	APBD Kabupaten	30 Orang	129.084.500	APBD Kabupaten	30 Orang	200.285.000	APBD Kabupaten	30 Orang	220.315.000	APBD Kabupaten	30 Orang	242.347.000	APBD Kabupaten	90 Orang	792.031.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	0 Orang	0	APBD Kabupaten	0 Orang	0	APBD Kabupaten	40 Orang	285.000.000	APBD Kabupaten	40 Orang	302.500.000	APBD Kabupaten	40 Orang	332.750.000	APBD Kabupaten	40 Orang	920.250.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	1 Dokumen	121.396.600	APBD Kabupaten	2Dokumen	274.000.000	APBD Kabupaten	2 Dokumen	302.000.000	APBD Kabupaten	2 Dokumen	332.200.000	APBD Kabupaten	2 Dokumen	1.029.596.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					TUJUAN : 3 SASARAN : 3 INDIKATOR SASARAN : 4 PROGRAM : 8 KEGIATAN : 31			1.055.465.700			5.111.784.000			7.817.315.200			8.619.119.338			9.501.335.940			25.937.770.478	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. BAMBANG ISTIAWAN**
Jabatan : **Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Drs. SJAICHUL GHULAM, M.M**
Jabatan : **Pjs. Bupati Malang**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Adapun jika terjadi kegagalan dalam pencapaian target kinerja maka saya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang siap mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, November 2020

Pihak Kedua,


Drs. SJAICHUL GHULAM, M.M

Pihak Pertama,


Drs. BAMBANG ISTIAWAN
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19670303 198602 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	90,6%
		Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Diselamatkan	68%
		Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana Yang Berhasil Dioperasionalkan	47%

	PROGRAM		ANGGARAN	KET.
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.323.221.347,81	APBDP
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	398.121.400,00	APBDP
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	0,00	APBDP
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	0,00	APBDP
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	94.793.500,00	APBDP
6.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp.	476.800.200,00	APBDP
7.	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Rp.	1.289.363.700,00	APBDP
8.	Program Rehabilitasi – Rekonstruksi Pasca Bencana	Rp.	299.236.140,00	APBDP
	JUMLAH	Rp.	3.881.536.287,81	

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang) siap untuk mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Malang, November 2020

Pjs. BUPATI MALANG

Drs. SJAICHUL GHULAM, M.M

**KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN MALANG**

Drs. BAMBANG ISTIAWAN
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670303 198602 1 003

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG**

No	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif melalui upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasana dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	83%	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	Pencegahan dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Dokumen Mitigasi Non Struktural	1 Dokumen	246.155.700,00
						Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	7 Sekolah	
						Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	1 Kegiatan	
						Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	58 Wilayah	
		Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	85%	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan	Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa	230.644.500,00
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	50 Paket	
						Jumlah Pusat Pengendalian dan Operasi (PUSDALOPS)	1 Unit	
Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil	85%				Jumlah Pelaksanaan Kaji Cepat	66 Kali	1.151.363.700,00	

		Diselamatkan		Bencana	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	600 Paket	138.000.000,00		
		Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana yang Berhasil Dioperasionalkan	100%	Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	30 Orang	57.015.500,00		
							Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1 Dokumen	242.220.640,00
								Jumlah Pengelola Data Kebencanaan	20 Orang	
								Jumlah SDM Paham JITU PASNA	30 Orang	
								Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Unit	

Malang, November 2020
KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN MALANG

Drs. BAMBANG ISTIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198602 1 003

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	FORMULA/ RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE			
										2018	2019	2020	2021
1.	Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kebersamaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif	Persentase Desa Tangguh Bencana	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana		$\frac{\sum \text{desa tangguh bencana yang direncanakan}}{\sum \text{desa tangguh bencana yang terbentuk}} \times 100\%$	62,5%	71,9%	81,3%	90,6%	100%
							Presentase Jumlah Korban Bencana Yang Berhasil Diselamatkan	$\frac{\sum \text{daerah rawan bencana}}{\sum \text{korban yang berhasil diselamatkan}} \times 100\%$	-	-	85%	90%	95%
							Presentase Fasilitas Umum dan sarana Prasana Yang Berhasil di Optimalkan	$\frac{\sum \text{Obyek terdampak bencana}}{\sum \text{Obyek yang berhasil ditangani}} \times 100\%$	-	-	100%	100%	100%

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Prioritas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Kebersamaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengurangan Resiko Bencana 2. Penanganan Bencana Yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana 3. Pemulihan masyarakat dan pengoperasionalan sarana prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengurangan Resiko Bencana 2. Melaksanakan Penanganan Bencana Yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana 3. Melaksanakan Pemulihan masyarakat dan pengoperasionalan sarana prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 2. Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 3. Rehabilitasi – Rekonstruksi Pasca Bencana

**REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI		REALISASI NASIONAL (JIKA ADA)	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
			2019	2020	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif melalui upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	81,3%	90,6%	81,3%	90,6%	-	121.558.500,00	121.558.500,00

PENGUKURAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	90,6%	90,6%	100%
		Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Diselamatkan	68%	68%	100%
		Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana Yang Berhasil Dioperasionalkan	47%	47%	100%